



Isu dan Permasalahan

Malaria masih menjadi permasalahan kesehatan, baik di tingkat global maupun nasional. Pada tahun 2023, kasus malaria tercatat sekitar 263 juta di 83 negara, dengan jumlah kematian mencapai 597.000 jiwa. Saat ini, Indonesia berada pada posisi kedua tertinggi jumlah kasus malaria di Asia setelah India. Untuk menunjukkan komitmen terhadap upaya eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination* di Bali pada 16–17 Juni 2025 (*Asia Pacific Summit*).

Pada *Asia Pacific Summit*, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa sebanyak 476 dari total 514 kabupaten/kota, atau sekitar 79 persen wilayah Indonesia telah berhasil mencapai status eliminasi malaria. Adapun kriteria eliminasi malaria adalah tidak ada kasus penularan lokal, tingkat kasus positif dengan jumlah kasus yang diperiksa kurang dari 5 persen, serta angka kasus baru kurang dari 1 kasus per 1.000 penduduk. Kriteria ini harus diperoleh secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Eliminasi malaria menjadi penting karena malaria tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga berdampak secara ekonomi dengan mengurangi produktivitas dan beban finansial bagi keluarga dan sistem kesehatan.

Permasalahannya, dari segi jumlah, kasus malaria di Indonesia mengalami peningkatan dari 418.546 kasus pada tahun 2023 menjadi 543.965 kasus pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 persen lebih kasus ditemukan di wilayah Papua, dengan rincian sekitar 229.000 kasus di Provinsi Papua, 168.000 kasus di Provinsi Papua Tengah, 57.000 kasus di Provinsi Papua Selatan, 38.000 kasus di Provinsi Papua Pegunungan, 7.800 kasus di Provinsi Papua Barat, dan 7.200 kasus di Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, apabila penanganan malaria di Papua berhasil dilakukan, maka target capaian eliminasi pada tahun 2030 berpeluang besar untuk bisa terwujud.

Selama ini, penanganan malaria di wilayah Papua mengalami sejumlah kendala antara lain, faktor lingkungan, akses kesehatan, dan perilaku masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyaknya galian bekas tambang yang tidak ditutup kembali sehingga menjadi tempat perindukan nyamuk. Ke depannya, penanganan malaria di wilayah Papua perlu diperkuat melalui berbagai strategi pencegahan, seperti pencegahan berbasis lingkungan untuk memberantas habitat vektor malaria, penggunaan kelambu berinsektisida, pemberian obat pencegahan malaria secara massal, pemanfaatan kearifan lokal berupa tanaman obat tradisional, serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan deteksi dini serta pengobatan cepat dan tepat melalui skrining rutin daerah berisiko dan surveilans aktif.

Penguatan penanganan malaria juga diperlukan melalui kerja sama lintas negara dengan Papua Nugini, mengingat adanya potensi penyebaran penyakit di wilayah perbatasan. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari kepala daerah, partisipasi organisasi dan tokoh masyarakat di wilayah Papua, keterlibatan pihak swasta, pendanaan yang cukup dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan juga

telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria. Peraturan tersebut mengatur mengenai penanggulangan malaria melalui kegiatan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, surveilans, dan penanganan kasus. Permenkes ini dapat menjadi pedoman dalam penanganan malaria di wilayah Papua.

Atensi DPR

Untuk mendukung target capaian eliminasi malaria pada tahun 2030, Komisi IX DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang kesehatan perlu:

- Mendesak pemerintah memperkuat strategi penanganan malaria khususnya di wilayah Papua dengan fokus pada pencegahan berbasis lingkungan dan perilaku masyarakat.
- Mendorong pemerintah pusat maupun daerah memperkuat komitmen dalam penanganan malaria, salah satunya melalui pembentukan forum komunikasi lintas sektor antarpemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi.
- Memastikan pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan dasar di puskesmas, pelayanan rujukan, dan deteksi dini pada daerah berisiko.
- Mendorong pemerintah dalam penggunaan tanaman obat tradisional antimalaria dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan malaria.

Sumber

indonesia.go.id, 3 Juli 2024;
kemkes.go.id, 17 & 19 Juni 2025;
Kompas, 17 & 18 Juni 2025; dan
kompas.id, 17 Juni 2025.

Minggu ke-3 Juni
(16 s.d. 22 Juni 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdpri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*